



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

MINGGU, 13 MEI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pejabat Baru Diminta Selesaikan Temuan BPK

263 Pejabat Dirotasi

CURUP - Bupati Rejang Lebong (RL), Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si, melalui Sekda RL R.A. Denni, SH, MM meminta kepada seluruh pejabat baru yang baru dilantik untuk segera menyelesaikan temuan BPK dari laporan keuangan Pemkab RL tahun 2017.

Dimana ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada temuan BPK. Ini disampaikan Denni saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 263 pejabat eselon, II, III, dan pejabat eselon IV di lingkungan Pemkab RL, di Aula Pemkab RL, kemarin (12/5).

"Ada 12 OPD, diantaranya Dinas PUPRPKP, PDAM, Sekretariat DPRD dan beberapa OPD lainnya. Untuk PUPRPKP, ada sekitar Rp 2 miliar lebih. Sekretariat Dewan sekitar Rp 1 miliar lebih, dan PDAM berupa hutang kepada Pemkab RL sebesar

Rp 100 juta lebih. Termasuk juga kegiatan-kegiatan lain yang menjadi temuan BPK, harus ditindaklanjuti. Jadi LHP kita bisa lebih bagus lagi," papar Denni.

Sementara itu, terkait pelantikan dan sumpah jabatan yang digelar kemarin merupakan hasil dari job fit yang sudah dilaksanakan Pemkab RL beberapa waktu lalu. Sehingga ada sekitar 149 pejabat, yakni dari eselon II, III hingga eselon IV terpaksa menjadi staf alias nonjob.

"Langkah ini tidak lain karena Pak Bupati mau para pemangku jabatan benar-benar berkompeten dan melaksanakan kinerja dengan baik sesuai tugas pokok. Beberapa orang eselon II yang menjadi staf berpeluang mengikuti proses lelang jabatan. Untuk eselon III dan eselon IV kemungkinan kut job fit atau uji kompetensi," ungkap Denni.

Lebih lanjut dikatakan, Bupati RL juga meminta agar tidak ada lagi Kepala OPD yang diatur-atur bawahannya. Karena ada kejadian Kepala OPD minta kepada dirinya untuk tidak ikut melakukan perjalanan dinas di OPD-nya sendiri.

"Ada kepala OPD yang datang dengan saya untuk minta agar dia tidak diizinkan berangkat dinas luar. Kan aneh, bawahannya yang mengajukan izin perjalan dinas, ia menolak dan minta saya yang tak mengizinkan. Kenapa dia tidak langsung bilang saja sama bawahannya tak dimasukkan dalam kegiatan perjalanan dinas," papar Denni.

Ditambahkan, kondisi tersebut jangan sampai terjadi lagi dan Bupati RL minta agar antara atasan dengan bawahan ada komunikasi yang baik. Agar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan pro-

gram kerja di OPD masing-masing bisa berjalan dengan baik. Dirinya juga mengingatkan soal pengajuan perjalanan dinas, agar tidak terjadi lagi seperti yang terjadi di Dinas Dikbud RL.

"Beberapa waktu lalu (Dinas Dikbud-red) mengajukan izin perjalanan dinas. Tapi pengajuannya di pecah-pecah alias dipisah. Pertama kabid A dengan staf-stafnya. Lalu kabid B dengan staf-stafnya dan itu sudah berapa orang. Harusnya cukup satu pengajuan atau sekaligus dan pejabat yang berkompeten saja bisa berangkat," pungkas Denni.

Sementara itu, data yang terhimpun setidaknya ada 7 pejabat eselon II yang ikut dalam pelantikan kemarin. Sedangkan untuk pejabat eselon III sebanyak 17 orang, dan sisanya ikut pelantikan merupakan pejabat eselon IV.(dtk)